

ABSTRAK

Lagu atau musik merupakan karya seni yang mencerminkan perasaan penciptanya dan sering kali digunakan untuk menghilangkan penat. Musik, dengan berbagai genrenya seperti klasik, pop, jazz, dan lain-lain, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam era digital, musik mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat serta pelaku usaha hiburan seperti kafe dan restoran untuk tujuan komersial, guna menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Penelitian ini berfokus pada praktik pemutaran lagu di Kafe Klasik Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini mengharuskan pembayaran royalti atas penggunaan komersial lagu kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Selain itu penelitian ini juga berfokus pada bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap regulasi PP 56/2021 serta jenis lagu-lagu yang diputar di Kafe Klasik, apakah telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan manajer kafe dan dokumentasi terkait penelitian ini. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kafe Klasik telah menerapkan sejumlah peraturan untuk menjaga suasana kondusif termasuk peraturan pemilihan lagu yang tidak mengandung unsur pornografi dan SARA. Namun, praktik pemutaran lagu ini belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 karena kafe belum mendaftarkan lisensi lagu di LMKN dan belum membayar royalti. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, praktik ini melanggar prinsip keadilan (*adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pemanfaatan karya cipta tanpa izin dianggap haram dan sama dengan mencuri, yang berarti memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah. Peran LMKN dalam mengelola royalti sangat penting untuk memastikan keadilan bagi pencipta lagu.

Kata Kunci: Royalti Hak Cipta Lagu, PP Nomor 56 Tahun 2021, Hukum Islam

ABSTRACT

Songs or music are works of art that reflect the creator's feelings and are often used to remove tiredness. Music, with its various genres like classical, pop, jazz, and others, has become an integral part of everyday life. In the digital age, music is easily accessible and used by the public as well as entertainment entrepreneurs such as cafes and restaurants for commercial purposes, to attract customers and increase revenue. The research focuses on the practice of playing songs at the Telang Village Classical Cafe, Kamal District, Bangkalan District, which has not fully complied with the provisions of PP No. 56 Year 2021 on the Management of Copyrights of Songs and/or Music. This regulation requires payment of royalties for commercial use of songs to the creators through the National Collective Management Institute. (LMKN). Besides, this study also focuses on how the view of the Islamic Law on regulation PP 56/2021 as well as the type of songs played in the Classic Café, have been in accordance with Islamic sharia or not?

The research method used is qualitative with an analytical descriptive approach. The data was obtained through observations, interviews with cafe managers and documentation related to this research. The analysis was done by comparing the regulations in PP No. 56 Year 2021 and the principles of Islamic law.

The results of the research show that the Café Classic has implemented a number of regulations to maintain a conducive atmosphere including the selection of songs that do not contain pornographic elements and SARA. However, the practice of playing this song is not fully in line with PP No. 56 of 2021 because the café has not registered a song license in the LMKN and has not paid royalty. This is contrary to Islamic law; this practice violates the principle of justice (adl) and protection of property. (hifz al-mal). The use of copyright without permission is considered illegal and equals theft, which means using other people's property illegally. LMKN's role in managing royalties is crucial to ensuring justice for song creators.

Keywords: *Copyright Royalty Song, PP No. 56 Year 2021, Islamic Law*